



**KURIKULUM MATA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
FASILITATOR  
DESA TANGGUH BENCANA**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**2013**



**KURIKULUM MATA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
FASILITATOR  
DESA TANGGUH BENCANA**

2013

**TIM PENYUSUN  
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
FASILITATOR DESA TANGGUH BENCANA**

- |     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 1.  | Ir. B. Wisnu Widjaja, M.Sc      | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 2.  | Sigit Padmono Dewo              | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB |
| 3.  | Enny Supartini                  | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB |
| 4.  | Drs. Pangarso Suryotomo         | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 5.  | Drs. Hermana                    | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 6.  | R. Theodora Eva Y. A, M.Si Han  | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 7.  | Apriyuanda G Bayu Pradana, M.Sc | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 8.  | Henrikus Adi Hernanto           | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 9.  | Roswanto, SE                    | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 10. | Jajat Suarjat                   | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 11. | Sri Sundari                     | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 12. | Gusti Rachmawati                | Pusdiklat PB BNPB                       |
| 13. | Satrio Nurhadi Wibowo           | Biro Hukum dan Kerjasama                |
| 14. | Eko Teguh Paripurno             | UPN Veteran Yogyakarta                  |
| 15. | Benny Usdianto                  | Koperasi Circle                         |
| 16. | Chasan Ascholani                | AIFDR                                   |
| 17. | Anna Maria                      | AIFDR                                   |
| 18. | Indra Nurpatria                 | AIFDR                                   |
| 19. | Willy Wicaksono                 | Mercy Corps                             |
| 20. | Lukman Hakim                    | Oxfam                                   |
| 21. | Bevita Dwi                      | PMI                                     |
| 22. | Catur Sudiro                    | MPBI                                    |
| 23. | Ninil R. Jannah                 | Lingkar                                 |
| 24. | Paulina Laurentina Diana        | UNHAN                                   |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana dapat tersusun sebagai salah satu upaya untuk mendukung program penanggulangan bencana di Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia adalah komponen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program pelatihan yang didukung dengan pengembangan kurikulum sebagai panduan dalam pelaksanaannya.

Kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana, baik yang dilaksanakan di lingkungan BNPB, BPBD maupun instansi/lembaga/organisasi lainnya. Disadari bahwa penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan kurikulum ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kurikulum ini.

Jakarta, Desember 2013

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

Ttd

Ir. B. Wisnu Widjaja, M.Sc

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kerangka Dasar Kurikulum.....	4
C. Tujuan, Sasaran, Manfaat .....	10
D. Daftar Istilah .....	12
<b>BAB II KONSEP DAN PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM PELATIHAN FASILITATOR DESA TANGGUH BENCANA YANG BERBASIS KOMPETENSI</b>	
A. Konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi .....	17
B. Konsep Desa Tangguh Bencana .....	20
C. Prinsip Kurikulum Berbasis Kompetensi .....	21
D. Peta Kompetensi Fasilitator Desa Tangguh Bencana.....	23
E. Pendekatan Proses Pendidikan dan Pelatihan PB.....	30
<b>BAB III PERSYARATAN UMUM DAN SILABUS KURIKULUM PELATIHAN FASILITATOR DESA TANGGUH BENCANA</b>	
A. Persyaratan Umum.....	35
B. Silabus .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 17.583 pulau yang memiliki lebih dari 500 gunung berapi yang 128 diantaranya terbilang aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Selain itu, terdapat aktivitas pergerakan 3 lempengan, yakni Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik yang dapat memicu terjadinya gempa bumi, letusan gunung api dan longsor. Potensi risiko bencana di Indonesia juga bertambah dengan kondisi perubahan iklim bumi. Perubahan iklim menimbulkan kondisi cuaca hujan ekstrim ataupun kekeringan ekstrim, serta suhu ekstrim yang memicu angin kencang. Hal ini tentu menimbulkan bahaya lanjutan seperti longsor dan banjir bandang setelah hujan deras ataupun kerawanan pangan setelah kekeringan panjang.

Lebih dari 237 juta orang di Indonesia<sup>1</sup> terus-menerus hidup dengan risiko bencana, khususnya sekitar 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan<sup>2</sup>. Masyarakat berhadapan langsung dengan potensi risiko bencana, sekaligus yang akan bertindak merespons pertama kali ketika bahaya bencana terjadi. Sebagai penduduk Indonesia, mereka berhak mendapat perlindungan negara dari potensi risiko bencana. Sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Masyarakat bukanlah satu entitas yang sama dimana mereka hidup pada situasi dan konteks yang berbeda-beda, maka risiko bencana suatu kelompok masyarakat akan berbeda satu sama lain. Risiko bencana pada masyarakat di desa/kelurahan yang hidup di dataran tinggi akan berbeda dari mereka yang tinggal di dataran rendah dan wilayah pantai.

---

<sup>1</sup> Sensus Penduduk 2010 ([http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=12](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12))

<sup>2</sup> Ibid ([http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=23&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23&notab=1))

Maka, bagaimana agar masyarakat terlindungi dari risiko bencana di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lain.

Secara umum, masyarakat perlu mengembangkan dan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kekhasan situasi dan konteks wilayahnya untuk memaksimalkan kapasitas yang ada, agar terlindung dari risiko bencana di wilayahnya. Tanpa pengelolaan kapasitas yang sesuai untuk menghadapi bencana, masyarakat dapat kehilangan orang-orang yang dikasihi, rumah dan aset-aset lain, mata pencaharian, bahkan hingga kerusakan lingkungan tempat hidup mereka. Sebaliknya, dampak bencana menjadi minimal bila masyarakat memiliki kapasitas yang sesuai situasi dan konteks wilayahnya, serta mampu mengelolanya. Masyarakat tangguh terhadap bencana ketika mereka mampu menghadapi potensi risiko bencana, menyerap dan mengakomodasinya (beradaptasi), serta memulihkan diri dari dampak bencana secara cepat dan tepat termasuk dengan merawat dan memulihkan struktur dan fungsi dasar yang amat penting<sup>3</sup>.

Pemerintah Indonesia menyadari keragaman situasi dan kompleksitas masalah yang dapat ditimbulkan oleh bencana, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyusun perangkat kelembagaan dari pusat hingga daerah, dan aturan pendukungnya sebagai salah satu upaya melindungi penduduknya. Pemerintah juga melakukan berbagai program yang berkontribusi pada penguatan ketangguhan masyarakat. Program Desa Tangguh Bencana dari BNPB, misalnya, bertujuan agar desa memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bahaya bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Beberapa program pemberdayaan bagi masyarakat lain, diantaranya "Desa Siaga Aktif" (Kementerian Kesehatan), "Desa Mandiri Pangan" (Dewan Ketahanan Pangan), "Desa Mandiri Energi" (Kementerian Pertanian), "Desa Pesisir Tangguh" (Kementerian Kelautan dan Perikanan),

---

<sup>3</sup> Definisi resiliensi menurut UNISDR

"Kampung Iklim" (Kementerian Lingkungan Hidup), "Kampung Siaga Bencana" (Kementerian Sosial), Program PNPM (Kementerian Dalam Negeri).

Urusan bencana merupakan tanggung jawab bersama, terlebih di wilayah Indonesia yang luas dan berisiko tinggi. Menyadari hal tersebut, lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha juga mengembangkan berbagai program untuk memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Program-program yang dikembangkan pemerintah, lembaga non-pemerintah dan dunia usaha beragam memiliki kekhususan sasaran, karakteristik, dan metode pendekatan yang berbeda. Bila ditelaah lebih lanjut, semua memiliki kesamaan yaitu pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Mengingat risiko bencana yang dihadapi masyarakat pedesaan berbeda-beda sesuai situasi dan konteks wilayahnya, maka berbagai program ini dapat memperkuat ketangguhan masyarakat secara khusus/spesifik sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Program Desa Tangguh Bencana (BNPB) misalnya, dapat dilengkapi dengan program Desa Pesisir Tangguh (KKP) untuk masyarakat pedesaan di pesisir pantai. Sedangkan untuk mereka di dataran tinggi ataupun daerah-daerah terisolir seperti pulau-pulau kecil dan terdepan, ketangguhan masyarakat dapat diperkuat dengan program Desa Mandiri Pangan (DKP). Khusus untuk wilayah dengan bahaya kesehatan berupa wabah dan kejadian luar biasa, program Desa Siaga Aktif (Kesehatan) akan menunjang pengembangan desa tangguh bencana. Penguatan dan pengembangan ketangguhan masyarakat terhadap bencana tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan atau penanganan program.

Dalam pelaksanaan berbagai program ketangguhan masyarakat terhadap bencana, seringkali ditemukan minimnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan program. Akibatnya, kualitas pelaksanaan program menjadi beragam dan dampaknya di masyarakat belum sebaik yang diharapkan. Maka, Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merancang kurikulum Pelatihan



Fasilitator Desa Tangguh Bencana sebagai upaya menyediakan sumber daya manusia yang kompeten. Pusdiklat PB BNPB tidak membatasi penggunaan kurikulum ini semata untuk pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana BNPB. Kurikulum Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana memberikan panduan bagi setiap pihak yang membutuhkan fasilitator masyarakat yang kompeten. Kurikulum ini disusun berdasarkan kompetensi yang diperlukan untuk memfasilitasi masyarakat desa agar tangguh menghadapi bencana, terlepas dari kekhususan masing-masing program. Peta kompetensi yang disusun pada kurikulum ini dapat menjadi bagian dari pengembangan kompetensi fasilitator di program-program lain, sehingga kompetensi fasilitator tiap program dapat saling terhubung dan fasilitator masyarakat dapat menjalankan berbagai program yang ada.

## **B. KERANGKA DASAR KURIKULUM**

### **B.1. Landasan Konseptual**

Menurut UN-ISDR (Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana), resiliensi atau ketangguhan adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang berpotensi terpapar bahaya bencana, untuk menghadapi bahaya, menyerap dan mengakomodasi (beradaptasi) dan memulihkan diri dari dampak bencana secara cepat dan tepat, termasuk merawat dan memulihkan struktur dan fungsi dasar yang amat penting. Kapasitas tersebut ditentukan oleh sejauh mana sistem sosial yang ada mampu mendorong masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri untuk meningkatkan kapasitas dari bencana agar mampu melindungi diri lebih baik di masa depan dan meningkatkan tindakan-tindakan peredaman risiko. (UN-ISDR, 2004).

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), sebuah lembaga regional untuk penguatan kapasitas terkait bencana di Thailand, menyatakan ciri ketangguhan adalah adanya pengetahuan tentang risiko, adanya rencana PRB dan kesiapsiagaan masyarakat, adanya dana masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PRB, adanya sistem peringatan

dini, dan adanya organisasi masyarakat yang dinamis. Ini semua perlu didukung dengan adanya tenaga terlatih untuk pengkajian risiko, pencarian dan penyelamatan (SAR), tenaga medis untuk pertolongan pertama, distribusi bantuan, para tukang untuk konstruksi yang lebih aman, dan petugas pemadam kebakaran. Selain itu, masyarakat yang tangguh juga perlu didukung oleh infrastruktur dan fasilitas seperti jalan-jalan, listrik, telepon, dan klinik yang baik, serta hubungan dengan pemerintah lokal, LSM, dan lembaga terkait lainnya. Keberadaan rumah warga yang aman bencana serta sumber-sumber penghidupan yang lebih aman juga mendukung ketangguhan masyarakat.

Sementara, lembaga regional serupa di Filipina, IIRR menyatakan bahwa pada dasarnya resiliensi atau ketangguhan adalah kemampuan masyarakat untuk menyerap (mengantisipasi dan menghadapi), menyesuaikan diri (beradaptasi) dan mentransformasikan diri (terkait sistem sosial) dalam menghadapi risiko bencana. Masyarakat yang tangguh terhadap bencana bercirikan individu-individu di dalam masyarakat tahu bagaimana mengantisipasi dan menyelamatkan diri ketika ada bahaya, terjamin kebutuhan dasar dan kesehatannya bahkan di saat bencana dan sesudahnya, sumber penghidupannya terlindungi, didukung oleh ekosistem yang cukup sehat untuk menjadi sumber mata penghidupan dan tempat hidup masyarakat, serta memiliki sistem sosial yang bisa menyiapkan dan menggerakkan masyarakat dan seperangkat kebijakan/aturan yang berfungsi melindungi masyarakat dari potensi risiko bencana.

Berbagai macam definisi dan konsep ketangguhan yang ada dapat membingungkan pengguna. John Twigg (2009) memberikan karakteristik operasional yang diterima cukup banyak pihak. Sebuah masyarakat yang tangguh terhadap bencana setidaknya memiliki: 1) kapasitas untuk mengantisipasi risiko bencana, (2) kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan yang berpotensi menghancurkan melalui adaptasi atau perlawanan (3) kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu dalam situasi bencana, dan (4)

kapasitas untuk memulihkan diri atau bangkit kembali atau melenting balik setelah suatu kejadian bencana.

'Resiliensi atau ketangguhan' merupakan konsep yang lebih luas daripada 'kapasitas'. 'Ketangguhan' lebih dari sekadar perilaku, strategi dan langkah-langkah manajemen risiko bencana yang biasanya dipahami sebagai 'kapasitas'. Meski begitu, dalam penggunaan konsep secara praktis sehari-hari, seringkali 'ketangguhan' disamakan dengan 'kapasitas' dan 'kapasitas mengatasi/menyesuaikan diri (*coping capacity*)'.

Fokus pada ketangguhan berarti lebih menekankan kepada apa yang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bagaimana memperkuat kapasitas mereka; bukan menekankan pada kerentanan masyarakat terhadap bencana atau kebutuhan mereka di saat darurat. Ketangguhan merupakan kebalikan dari kerentanan<sup>4</sup>. Seperti kerentanan, ketangguhan juga kompleks dan berlapis-lapis; unsur kompleks dan berlapis itu perlu disasar secara berbeda untuk menghadapi beragam potensi risiko bencana.

Dalam mengembangkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, Twigg menawarkan cara pandang yang memudahkan yaitu (1) mengembangkan dan memperkuat masyarakat agar dapat hidup seaman mungkin dan terlindungi dalam konteks bencana, (2) meminimalkan kerentanan masyarakat dengan memaksimalkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana (PRB). PRB dipandang menjadi sekumpulan tindakan dan proses untuk menuju ketangguhan masyarakat.

## **B.2. Landasan Empirik**

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan masyarakat. Sejalan dengan implementasi Kerangka Aksi Hyogo, beberapa kementerian dan lembaga menyelenggarakan program-

---

<sup>4</sup> Twigg (pdf)

program di tingkat masyarakat untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan membangun ketangguhan. Program-program ini menggunakan pendekatan dan strategi yang beragam, serta masyarakat sasaran yang berbeda pula, walau tujuannya biasanya sama: memberdayakan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Selain Desa Tangguh Bencana (BNPB), beberapa program lain diantaranya Desa Siaga Aktif (Kementerian Kesehatan), 'Desa Mandiri Pangan' (Dewan Ketahanan Pangan), 'Desa Mandiri Energi' (Kementerian Pertanian), 'Desa Pesisir Tangguh' (Kementerian Kelautan dan Perikanan), 'Kampung Iklim' (Kementerian Lingkungan Hidup), 'Kampung Siaga Bencana' (Kementerian Sosial), Program PNPM (Kementerian Dalam Negeri).

Lembaga non-pemerintah dan dunia usaha juga mempunyai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan. Program-program tersebut juga bervariasi, diantaranya program yang mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat bencana, fokus ke aspek pengurangan dampak bencana, juga ada yang mensasar aspek ekonomi dan sumber penghidupan sebagai faktor yang rentan, khusus pada aspek lingkungan hidup, ataupun memadukan beberapa aspek seperti pengurangan risiko bencana, lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim.

Bila kita melihat ke tujuan utama membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana, keragaman program merupakan kekayaan. Sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan risiko bencana yang spesifik di suatu masyarakat. Masyarakat pedesaan di Indonesia memiliki beragam situasi dan konteks kehidupan dengan risiko bencana yang berbeda pula; khas dan spesifik untuk setiap kelompok masyarakat. Maka, keragaman program ketangguhan masyarakat dapat menjawab kebutuhan spesifik tersebut. Namun, tuntutan dan pendekatan setiap program yang berbeda-beda dapat membuat pengelola dan pelaksana program fokus pada program masing-masing. Seolah-olah tidak ada keterhubungan tujuan dan pelaksanaan. Akan lebih baik apabila tiap

program ketangguhan masyarakat saling terhubung dan terkait, baik dalam pelaksanaan maupun kerangka arah program; semua masuk dalam kerangka membangun ketangguhan masyarakat.

Seperti dinyatakan Twigg (2009), ketangguhan masyarakat memiliki beragam aspek dan lapisan yang berbeda-beda, yang semuanya perlu disasar demi mewujudkan masyarakat tangguh terhadap bencana. Perlindungan masyarakat dari bencana khususnya mereka yang paling rentan adalah landasan yang menghubungkan setiap program.

Salah satu prasyarat agar program-program tersebut berdampak pada ketangguhan masyarakat adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan program di level desa/kelurahan. Pelaksana program di desa/kelurahan merupakan ujung tombak keberhasilan dan mutu program; merekalah yang memfasilitasi masyarakat secara langsung. Sebagai fasilitator masyarakat, mereka bertugas memperlancar semua tindakan dan proses-proses di desa/kelurahan untuk menuju ketangguhan terhadap bencana.

Fasilitator bertindak menggerakkan masyarakat agar dapat mengkaji risiko dan memfokuskan pada elemen berisiko yang paling penting, merencanakan dan melakukan tindakan melindungi elemen paling berisiko di desa, memobilisir sumberdaya internal dan eksternal, mempercepat proses-proses menuju ketangguhan, menghubungkan masyarakat dengan berbagai pihak yang dapat mendukung. Dalam praktiknya, dalam pemantauan pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana, ditemukan bahwa fasilitator masyarakat masih perlu peningkatan kapasitas agar dapat memperlancar proses masyarakat menuju ketangguhan. Selain itu, banyaknya jumlah program ketangguhan masyarakat juga memerlukan kecukupan jumlah personil untuk memfasilitasi masyarakat.

Berbicara tentang kompetensi fasilitator masyarakat, saat ini belum ada standar kompetensi bagi para fasilitator masyarakat. Hal ini wajar karena fasilitator masyarakat bukanlah sebuah profesi melainkan wujud kepedulian untuk menggerakkan masyarakat. Pihak pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha maupun warga masyarakat desa itu sendiri

dapat menjadi fasilitator masyarakatnya. Alasan awal menjadi fasilitator masyarakat dapat berbeda-beda, mulai dari mendapat penugasan atasan hingga memang terpanggil untuk mewujudkan kepedulian, tetapi komitmen menjalankan peran fasilitator yang akan membedakan proses fasilitasi di masyarakat. Selain komitmen, faktor penting lain adalah latar belakang pendidikan.

Keragaman latar belakang pendidikan dan pengalaman tidak membatasi seseorang untuk menjadi fasilitator masyarakat. Siapapun dapat melakukan peran tersebut, meskipun dengan memiliki latar belakang pendidikan tertentu seseorang dapat lebih leluasa memahami informasi dan menyebarkannya ke masyarakat. Berkaca dari keragaman latar belakang tersebut, diperlukan suatu kisi-kisi yang menunjukkan kompetensi inti yang perlu dikuasai fasilitator. Apapun latar belakangnya, seorang fasilitator masyarakat perlu memiliki kompetensi inti yang serupa agar program-program ketangguhan masyarakat memiliki semacam kesesuaian mutu. Membiarkan fasilitator masyarakat bergerak seadanya tidak akan membantu masyarakat menuju ketangguhan.

### **B.3. Landasan Yuridis**

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- g. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

- h. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
- i. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
- j. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.
- k. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (KSB).
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012.
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/ 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri 34 Nomor 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- p. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
- q. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

## **C. TUJUAN, SASARAN, MANFAAT**

### **C.1. Tujuan**

Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana merupakan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana untuk menyiapkan sumber daya manusia sehingga mereka menjadi fasilitator masyarakat yang mampu

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun ketangguhan terhadap bencana secara mandiri.

Kurikulum ini disusun dalam suatu rangkaian pelatihan berjenjang dan berkelanjutan, yang setiap tahapnya memiliki tujuan mengasah dan meningkatkan kompetensi yang berbeda dan menjadi landasan bagi tahap pelatihan berikutnya.

## **C.2. Sasaran**

Sasaran peserta pendidikan dan pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana adalah berbagai pihak yang berkepentingan dan berkomitmen untuk menjalankan program-program ketangguhan masyarakat secara mandiri, meliputi BPBD dan OPD terkait, LSM, ormas, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan lembaga usaha.

## **C.3. Manfaat**

### Bagi Peserta

Rangkaian pelatihan ini mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta yang dibutuhkan untuk memfasilitasi ketangguhan masyarakat terhadap bencana, sehingga peserta mencapai elemen kompetensi yang sudah ditetapkan di tiap jenjang. Proses belajar dalam pelatihan memungkinkan peserta untuk secara aktif membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap dari paparan narasumber, pengetahuan dan pengalaman peserta lain, serta aplikasi/simulasi langsung di lokasi masyarakat tinggal. Di tiap akhir jenjang pelatihan, peserta yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat dan brevet sebagai bukti bahwa peserta telah mencapai kompetensi yang ditetapkan.

### Bagi Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah dan Dunia Usaha

Kurikulum Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana merupakan upaya Pusdiklat PB untuk menjawab meningkatnya kebutuhan ketersediaan



fasilitator masyarakat yang kompeten, yang dibutuhkan BNPB dan BPBD di daerah serta K/L lain, juga pihak non-pemerintah dan dunia usaha yang terlibat dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana berkontribusi pada tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai standar yang ditetapkan BNPB, sehingga kebutuhan lembaga terpenuhi. Pelatihan ini juga menjadi peluang bagi lembaga untuk meningkatkan kompetensi staf dan memberikan ruang belajar bagi staf.

#### Bagi Penyelenggara

Kurikulum Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh memandu penyelenggara pelatihan untuk memastikan adanya rangkaian pelatihan yang terarah dan terencana. Para penyelenggara pelatihan menggunakan kurikulum ini untuk mengantisipasi kebutuhan sarana dan prasarana, menentukan fasilitator/narasumber yang akan mengampu proses pelatihan, menentukan calon peserta.

#### Bagi Masyarakat

Kemampuan masyarakat untuk membangun ketangguhan terhadap bencana secara mandiri akan semakin meningkat. Dengan fasilitasi dari peserta pelatihan, proses di masyarakat berlangsung cukup lancar, ada tindakan-tindakan yang muncul dari rekomendasi masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, serta berdampak pada berkurangnya risiko bencana.

### **D. DAFTAR ISTILAH**

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2003).
2. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

3. Silabus adalah perencanaan pembelajaran pendidikan dan diklat yang memuat kompetensi dasar, materi, metode pembelajaran, evaluasi dan media serta bahan ajar.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007).
5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Undang Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007).
6. Pengelolaan Risiko Bencana merupakan upaya sistematis, terstruktur, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana. Pengelolaan risiko bencana dilakukan melalui tahapan pemahaman konteks, identifikasi risiko, analisis risiko evaluasi risiko dan penanganan risiko.
7. Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBK) merupakan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengalaman masyarakat untuk mengatasi dan menghadapi bencana, yang berfokus pada kegiatan partisipatif untuk melakukan kajian, perencanaan, pengorganisasian kelompok masyarakat, serta pelibatan dan aksi dari berbagai pemangku kepentingan, dalam menanggulangi bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Tujuannya agar masyarakat mampu mengelola potensi risiko bencana, mengurangi dampaknya, maupun memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar.

8. Kajian Risiko Bencana adalah suatu metodologi untuk menentukan proses dan keadaan risiko melalui analisis potensi bahaya (hazards) dan evaluasi kondisi kini dari kerentanan yang dapat berpotensi membahayakan orang, harta, kehidupan, dan lingkungan tempat tinggal (UN-ISDR, *Living with Risk*, 2004).
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
10. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012).
11. Istilah-istilah lokal yang setara dengan Desa/Kelurahan:
  - Aceh: Gampoeng dipimpin oleh Keuchik;
  - Sumatera Barat: Nagari dipimpin oleh Wali Nagari;
  - Papua: Kampung dipimpin oleh Kepala Kampung;
  - Maluku: Negeri dipimpin oleh Raja;
  - Lampung: Pekon dipimpin oleh Peratim.
12. Masyarakat atau komunitas adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena bencana, yang pada akhirnya mempunyai kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012).
13. Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah seperangkat teknik partisipatif dan visual untuk menilai sumberdaya kelompok dan

masyarakat, mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah serta menilai strategi untuk memecahkan masalah tersebut. PRA merupakan metodologi penelitian/perencanaan dimana masyarakat setempat (dengan atau tanpa bantuan dari luar) mempelajari masalah yang terjadi dalam masyarakat, memprioritaskan masalah, mengevaluasi pilihan-pilihan untuk memecahkan masalah, kemudian menyusun Rencana Aksi Komunitas untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan<sup>5</sup>.

14. SWOT adalah model dasar untuk menilai kemampuan dan kelemahan yang ada dalam sebuah lembaga/kelompok/masyarakat, serta peluang dan ancaman potensial yang berasal dari luar lembaga/kelompok/masyarakat tersebut.

---

<sup>5</sup> <http://www.kstoolkit.org/Participatory+Rural+Appraisal+%28PRA%29> ,  
<http://www.fao.org/docrep/w7483e/w7483e0a.htm> (keduanya diakses pada 5/12/2013)



## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FASILITATOR DESA TANGGUH BENCANA YANG BERBASIS KOMPETENSI**

#### **A. KONSEP KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**

Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam proses pendidikan dan pelatihan, yaitu mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai (1) sebuah rencana/planning atau dokumen termasuk strategi dalam mencapai tujuan yang diharapkan, (2) sebagai pengalaman belajar/ experience, (3) suatu sistem yang berhubungan dengan manusia dan proses dari suatu organisasi manusia dan prosedur untuk implementasi dari sistem tersebut, (4) sebagai bidang ilmu, dan (5) sebagai suatu konten.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai/sikap yang direfleksikan dalam cara berpikir dan bertindak. Dengan perkataan lain, kompetensi merupakan kemampuan bertindak dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Antara proses berpikir dalam mengolah pengetahuan pada ranah kognitif, dengan keterampilan pada ranah psikomotor, serta nilai-nilai/sikap pada ranah afektif adalah satu kesatuan kekuatan terkait yang dikembangkan secara berkesinambungan, melalui intensitas, pelaksanaan, dan pembiasaan.

Pengetahuan dikembangkan melalui informasi berupa fakta, konsep, prosedural yang bersumber dari berbagai teori. Keterampilan dikembangkan melalui proses aplikasi untuk mencoba hal-hal baru atau meningkatkan keahlian yang telah dimiliki sehingga pada akhirnya peserta diklat menjadi semakin terampil/mampu. Sementara sikap dikembangkan berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma yang melekat pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tersebut. Dengan demikian, antara pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dimiliki menjadi suatu kekuatan yang bermanfaat dalam menghadapi suatu persoalan atau fenomena dalam kehidupan.

Kemampuan yang dimiliki akan menjadi keterampilan dan sikap setelah melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pemberian pengalaman nyata melalui serangkaian kegiatan seperti diskusi, analisis, studi kasus, mendemonstrasikan, membuat model, dan melakukan refleksi. Sejalan dengan pemahaman ini, maka pengertian kurikulum yang berbasis kompetensi adalah suatu rancangan atau desain pembelajaran yang menfokuskan pada pemberian pengalaman belajar yang mengaktifkan semua indra peserta didik sehingga kompetensi itu berkembang dari dalam diri yang bersangkutan.

Peranan instruktur, pelatih, atau pengajar lebih sebagai fasilitator yang mengkondisikan pembelajaran berlangsung secara aktif. Para fasilitator diharapkan mampu menciptakan strategi dan metode yang bervariasi yang dikembangkan dari pendekatan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang kompeten, mereka tidak hanya dikondisikan untuk mengetahui, tetapi juga harus mampu, dan akhirnya terbiasa sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak.

Pengembangan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mengacu kepada teori pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan alasan bahwa teori kurikulum lainnya tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Kemampuan menyelesaikan bidang-bidang pekerjaan terutama dalam penanganan bencana di Indonesia memerlukan tidak hanya pengetahuan tentang kebencanaan dan cara-cara penanganannya, tetapi berupa kemampuan integral antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kuat dari para pelakunya. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses siklik berulang dari mulai perencanaan, proses pengembangan, uji coba, implementasi, dan evaluasi kemudian kembali kepada perencanaan lagi untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum selanjutnya.

Dalam rancangan awal kurikulum, hasil evaluasi dari implementasi sebelumnya merupakan modal dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Proses pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut:

#### A.1. Analisis Konteks dan Kebutuhan

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kondisi mulai dari kebijakan yang ada, lingkungan alam, lingkungan sosial atau kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan dan mengklarifikasi kompetensi yang diinginkan (*profile outcomes*), peserta (*target audience*) dan faktor-faktor lain yang relevan dan berpengaruh terhadap rancangan kurikulum yang diharapkan.

#### A.2. Merumuskan Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan dirumuskan dalam berbagai tingkat, dari tujuan yang bersifat umum, tujuan yang bersifat lebih kecil, sampai tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebagai kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi-kompetensi yang dijamin dapat tercapai melalui pembelajaran langsung maupun tidak langsung; mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang diperlukan dalam mewujudkan desa tangguh bencana. Rumusan kompetensi juga dikaitkan dengan strategi lembaga atau organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan akan kemampuan sumber daya yang dilatih terpenuhi. Potongan-potongan kompetensi dipetakan terhadap apa yang saat ini ada, serta apa yang masih diperlukan. Matriks dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan perspektif keseluruhan.

#### A.3. Penetapan Metode dan Strategi Pembelajaran, Sumber Belajar serta Alat dan Bahan

Pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) dipilih sebagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan *andragogi*, kompetensi yang diharapkan dapat tercapai.



#### A.4. Penetapan Strategi Evaluasi hasil Belajar dan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi dilakukan untuk hasil belajar dan evaluasi kurikulum yang disusunnya. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan saat proses pendidikan dan pelatihan dan sesudahnya. Penetapan jenis dan teknis penilaian ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum dilakukan terhadap keseluruhan program pendidikan dan pelatihan.

### **B. KONSEP DESA TANGGUH BENCANA**

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana<sup>1</sup>. Komponen dalam Desa Tangguh Bencana adalah (1) Legislasi: peraturan desa yang mengatur pengelolaan risiko, (2) Perencanaan: rencana Penanggulangan Bencana Desa, Rencana Kontijensi, Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas – seluruh perencanaan ini menjadi bagian terpadu dari pembangunan, (3) Kelembagaan: forum penanggulangan bencana serta pengembangan kerjasama antar-sektor dan pemangku kepentingan, (4) Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya, (5) Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya kelompok relawan dan pelaku penanggulangan bencana, (6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, program pemulihan dan pembangunan, yang bersifat struktural fisik maupun non-struktural.

Untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, beberapa strategi dapat diterapkan oleh masyarakat. Yang paling umum adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi risiko bencana di desa dan kerentanan. Setelah pengetahuan meningkat,

---

<sup>1</sup> Perka BNPB no.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

kemudian masyarakat mulai merencanakan tindakan-tindakan untuk mengurangi kerentanan, mengurangi dampak dan beradaptasi dengan risiko bencana. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci utama, terutama pelibatan mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan. Perhatian khusus perlu diberikan pada upaya pengarusutamaan gender serta kelompok rentan lain – seperti anak, difabel dan lansia – dalam keterlibatan di kegiatan dan proses pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan tiap kelompok dalam masyarakat, penerapan keseluruhan rangkaian pengelolaan risiko bencana dapat memberikan dampak yang besar. Tentu saja, penguatan kapasitas terhadap tiap kelompok, terutama yang rentan, merupakan hal kunci. Bagaimana menerapkan pengelolaan risiko bencana?

Salah satu strategi adalah memanfaatkan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal seminimal mungkin dan membangun sinergi program dengan seluruh pelaku untuk memperkuat ketangguhan. Masyarakat juga perlu memadukan upaya pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan, serta melakukan pengarusutamaan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan berbagai lembaga di desa. Untuk itu, masyarakat perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari berbagai tingkat pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan berbagai strategi yang menyangkut beragam aspek ini, masyarakat - terutama yang kapasitasnya belum memadai - memerlukan fasilitator yang mampu menggerakkan, menghubungkan dan mempercepat proses-proses di masyarakat dan pihak terkait lainnya.

### **C. PRINSIP KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**

Tolok ukur pengembangan kurikulum saat ini adalah kualitas atau mutu. Merujuk pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa: (1) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui masyarakat; (2) kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang diklat kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor termasuk sektor penanggulangan bencana; (3) KKNi terdiri atas 9 jenjang kualifikasi dengan pengertian jenjang 1 adalah jenjang terendah dan jenjang 9 adalah jenjang tertinggi; (4) Jenjang kualifikasi KKNi tersebut secara detil dirinci sebagai berikut: jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan sebagai jabatan operator atau jenjang/tingkat dasar dalam penanggulangan bencana; jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan pada jabatan teknisi atau analis, atau jenjang/tingkat menengah pada pelaku penanggulangan bencana dan jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan pada jabatan ahli, atau jenjang/tingkat lanjut pada pelaku penanggulangan bencana, dan lulusan jenjang 9 ini, sudah berhak menjadi fasilitator untuk profesi yang sama.

Pada jenjang 9 ini diharapkan pelaku sudah melakukan inovasi atau rekayasa pada bidang profesinya. Hal ini akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas diklat yang akan diampunya bila yang bersangkutan meningkat menjadi fasilitator, sekaligus membantu pelaku penanggulangan bencana menjadi lebih profesional. Namun demikian, ada beberapa profesi yang hanya bisa dilakukan sampai tingkat menengah saja, oleh karena itu, untuk beberapa bidang/profesi tersebut, meskipun termasuk dalam jenjang menengah, namun sudah memungkinkan untuk menjadi fasilitator pada bidang/profesi dimaksud (Misalnya pada seksi dunia sementara)

Untuk meyakinkan bahwa setiap pelaku penanggulangan bencana akan mencapai kompetensi sesuai yang dipersyaratkan maka kurikulum yang dikembangkan harus mendukung pencapaian kompetensi dalam lingkup kompetensi profesional, sosial dan kepribadian yang menghasilkan “insan pelaku penanggulangan bencana yang tanggap, tangguh dan

tangkas”. Sedangkan untuk menjadi fasilitator, pelaku masih perlu dibekali lagi dengan kompetensi pedagogik.

Secara teknis, pengembangan kurikulum tentu harus diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan dengan analisis cermat sesuai dengan kompetensi dari masing-masing dimensinya.

Ciri-ciri rancangan Kurikulum Berbasis Kompetensi:

1. Menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta diklat sebagai keluaran proses pembelajaran
2. Materi ajar dan proses pembelajaran serta cara penilaian didisain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan untuk profesi tersebut.
3. Lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
4. Proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif secara prosedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar.
5. Disusun oleh penyelenggara diklat dan pihak-pihak berkepentingan terhadap jaminan mutu kompetensi pelaku.
6. Menyediakan peta pikiran yang jelas dalam hal proses pembelajaran mutu.

#### **D. PETA KOMPETENSI FASILITATOR DESA TANGGUH BENCANA**

Fasilitator Desa Tangguh Bencana adalah fasilitator masyarakat yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun ketangguhan terhadap bencana secara mandiri. Oleh sebab itu, fasilitator desa tangguh bencana diharapkan memiliki kompetensi inti sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
- 2) Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif untuk membangun ketangguhan.

- 3) Memfasilitasi perencanaan kegiatan dengan melibatkan banyak pihak untuk membangun ketangguhan masyarakat.
- 4) Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan program ketangguhan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya dan kearifan lokal secara akuntabel.
- 5) Mengkaji dan memberikan masukan sebagai pembelajaran dalam kerangka pengembangan dan keberlanjutan program.
- 6) Memfasilitasi pengembangan jaringan dan berbagi sumberdaya dengan pihak-pihak yang bisa memperkuat upaya ketangguhan masyarakat.
- 7) Memfasilitasi strategi advokasi masyarakat untuk mencapai ketangguhan.
- 8) Memfasilitasi pelembagaan upaya ketangguhan dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial di masyarakat.

Untuk mengasah kedelapan kompetensi inti tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan berjenjang yang dilakukan secara berkelanjutan dari tingkat dasar (*basic*), menengah (*intermediate*), hingga akhir (*advance*). Tiap jenjang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya yang bertujuan memperdalam kompetensi yang didapatkan dari jenjang sebelumnya, ataupun mengasah kompetensi yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, tiap jenjang harus dilalui satu persatu secara bertahap seperti tertera pada bagan di bawah ini.

No	Kompetensi Inti	Dasar	Tengah	Akhir
1.	Memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang ketangguhan masyarakat terhadap bencana	√		
2.	Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif untuk membangun ketangguhan	√	√	
3.	Memfasilitasi perencanaan kegiatan dengan melibatkan banyak pihak untuk membangun ketangguhan masyarakat	√	√	
4.	Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan program ketangguhan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya dan kearifan lokal secara akuntabel		√	
5.	Mengkaji dan memberikan masukan sebagai pembelajaran dalam kerangka pengembangan dan keberlanjutan program	√	√	
6.	Memfasilitasi pengembangan jaringan dan berbagi sumberdaya dengan pihak-pihak yang bisa memperkuat upaya ketangguhan masyarakat			√
7.	Memfasilitasi strategi advokasi masyarakat untuk mencapai ketangguhan			√
8.	Memfasilitasi pelembagaan upaya ketangguhan dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial di masyarakat			√

Pada setiap jenjang, kompetensi inti dijabarkan dalam beberapa kompetensi dasar yang khusus diasah pada jenjang tersebut. Materi yang diberikan bisa disesuaikan dengan konteks wilayah, kebutuhan belajar peserta dan waktu yang tersedia asalkan dapat mengasah atau meningkatkan kompetensi peserta. Lamanya pelatihan disusun berdasarkan Jam Pendidikan dan Latih (JPL) dimana 1 JPL setara dengan 45 menit. Tenaga pengajar dan peserta didik dapat menyesuaikan waktu dengan kebutuhan pembelajaran sesuai kesepakatan bersama, sejauh tujuan kompetensi tercapai. Berikut ini peta kompetensi yang disasar untuk setiap jenjang pendidikan dan pelatihan :

	No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi	Waktu (dalam JPL*)
	<b>BASIC</b>	1.	Memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang ketangguhan masyarakat terhadap bencana	a. Memahami keterkaitan antara penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan	Hubungan penanggulangan bencana, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan
b. Memahami dasar hukum, kebijakan PB dan yang terkait di tingkat nasional dan daerah				Dasar hukum & kebijakan PB nasional dan daerah, serta kebijakan terkait lainnya	4
c. Menganalisis konsep pengurangan risiko bencana				Analisis konsep pengelolaan risiko bencana	4
d. Memahami konsep PRBBK dan pelaksanaannya, serta memiliki pandangan/sikap yang berpusat pada orang (people centred)				Konsep dan pelaksanaan PRBBK	4
e. Memahami Desa Tangguh Bencana serta pelaksanaannya dalam berbagai program				Desa Tangguh Bencana dan program terkait	4
2.		Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif untuk membangun ketangguhan	f. Memiliki keterampilan dan sikap yang mendukung pembelajaran orang dewasa	Pembelajaran orang dewasa	4
		g. Merancang penggunaan PRA untuk proses pengkajian risiko bencana di masyarakat	Penggunaan PRA untuk pengkajian risiko bencana (dasar)	6	

No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi	Waktu (dalam JPL*)
3.	Memfasilitasi perencanaan kegiatan untuk membangun ketangguhan masyarakat dengan melibatkan banyak pihak	h. Membuat perencanaan kegiatan dengan melibatkan banyak pihak untuk membangun ketangguhan masyarakat	Perencanaan: penyusunan RAK (dasar)	4
		i. Merencanakan pengorganisasian relawan PB di desa/kelurahan	Pengorganisasian relawan PB	4
4.	Mengkaji dan memberikan masukan sebagai pembelajaran dalam kerangka pengembangan dan keberlanjutan program	j. Membuat dokumentasi pembelajaran program	Pendokumentasian dan pembelajaran	3

**Ket:**

**Tingkat Dasar (Basic):** minimal 40 JPL (1800 menit)

\* 1 JPL (Jam Pendidikan dan Latihan) = 45 menit



INTERMEDIATE	No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi	Waktu (dalam JPL*)
	1.	Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif untuk membangun ketangguhan	a.. Mengevaluasi penerapan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam memfasilitasi pengembangan ketangguhan masyarakat secara partisipatif	Evaluasi penerapan materi pelatihan tingkat dasar	3
			b. Menerapkan perangkat PRA lanjutan untuk desa Tangguh	Penggunaan PRA untuk pengkajian risiko bencana (lanjutan)	6
	2.	Memfasilitasi perencanaan kegiatan dengan melibatkan banyak pihak untuk membangun ketangguhan masyarakat	c. Membuat rencana kerja untuk melaksanakan RAK	Perencanaan: matriks perencanaan RAK dan kerangka acuan (lanjutan)	4
			d. Memahami komponen-komponen dalam rencana kesiapsiagaan	Penyusunan rencana kesiapsiagaan tanggap darurat	8
	3.	Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan program ketangguhan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya dan kearifan lokal secara akuntabel	e. Memahami monitoring dan evaluasi secara partisipatif	Monitoring-evaluasi partisipatif	4
			f. Memiliki keterampilan dasar mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan secara terbuka	Pengelolaan keuangan secara sederhana	4
			g. Mengembangkan program yang mengakomodir kebutuhan dan keterlibatan kelompok rentan	Pengembangan program: mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan	3

		h. Mengembangkan program Desa Tangguh yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa/ kelurahan	Pengembangan program: integrasi dengan rencana pembangunan desa/kelurahan	5
		i. Menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengembangan program ketangguhan masyarakat	Pengembangan program: penerapan prinsip akuntabilitas	5
4.	Mengkaji dan memberikan masukan sebagai pembelajaran dalam kerangka pengembangan dan keberlanjutan program	j. Membuat rekomendasi berdasarkan pengalaman lapangan	Penyusunan rekomendasi pengembangan program	3

**Ket:**

**Tingkat Menengah (*Intermediate*):** minimal 45 JPL (2025 menit)

\* 1 JPL (*Jam Pendidikan dan Latihan*) = 45 menit

ADVANCE	No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi	Waktu (dalam JPL)
	1.	Memfasilitasi pengembangan jaringan dan berbagi sumberdaya dengan pihak-pihak yang bisa memperkuat upaya ketangguhan masyarakat	a. Mengevaluasi penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun ketangguhan masyarakat	Evaluasi penerapan materi pelatihan tingkat menengah	2
			b. Menyusun strategi pengembangan jaringan	Strategi pengembangan jaringan dan mobilisasi sumberdaya	6
	2.	Memfasilitasi strategi advokasi masyarakat untuk mencapai ketangguhan	c. Mensintesis kebijakan untuk membangun ketangguhan masyarakat	Proses pengembangan kebijakan dan strategi advokasi	8
	3.	Memfasilitasi pelebagaan upaya ketangguhan dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial di masyarakat	d. Mensintesis sistem sosial di masyarakat yang mendukung ketangguhan masyarakat	Sistem sosial dan pelebagaan upaya ketangguhan masyarakat	8

**Ket:**

**Tingkat Lanjut (Advance):** minimal 24 JPL (1080 menit)

\* 1 JPL (Jam Pendidikan dan Latihan) = 45 menit

## E. PENDEKATAN PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PB

### E.1. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan dan pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (POD). POD merupakan proses belajar sistematis dan berkelanjutan pada orang dewasa untuk mencapai perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Orang

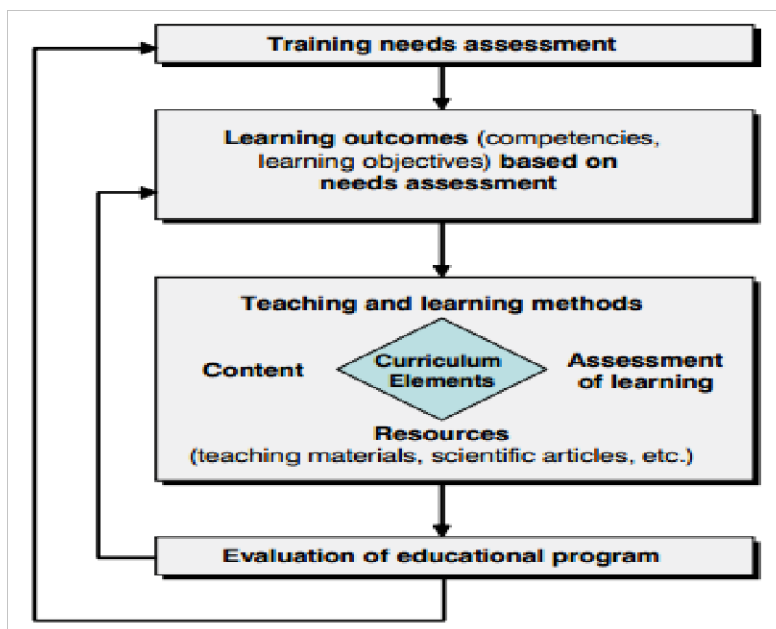
dewasa sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan sebelum adanya pendidikan dan pelatihan, mereka tidak membutuhkan teori yang tidak relevan dengan kehidupannya. Maka, proses pendidikan dan pelatihan ini menggunakan pengalaman peserta sebagai dasar/bahan belajar untuk dianalisis dan disimpulkan inti pembelajarannya; yang kemudian menjadi bahan untuk diterapkan dalam tugasnya sebagai fasilitator desa tangguh.

Proses pendidikan dan pelatihan dirancang untuk menyentuh seluruh aspek di dalam diri manusia yaitu kognitif (logika berpikir), afektif (perasaan), dan psikomotor (gerak/tindakan) agar terjadi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Untuk itu, dibutuhkan tenaga pengajar yang bukan berperan sebagai guru.

Tenaga pengajar memperlancar proses pembelajaran peserta dengan mendorong peserta menguraikan pengalaman secara terstruktur, menggali tanggapan peserta, memberikan informasi-informasi lain yang relevan dan dapat digunakan peserta, mendorong peserta untuk menemukan pola hubungan dan kaitan antar-topik, serta hal-hal baru yang dapat dikembangkan. Ia lalu mengajak peserta merumuskan makna realitas tersebut sebagai suatu pemahaman baru. Pemahaman baru tersebut lalu digunakan peserta untuk merumuskan dan merencanakan tindakan baru yang lebih baik atau memperkuat yang sudah baik, dan menerapkannya dalam tugas peserta sebagai fasilitator desa tangguh.

Namun, perlu dipahami bahwa perubahan pada pengetahuan, sikap dan keterampilan tidak serta-merta membuat peserta dapat menerapkan pembelajarannya secara optimal. Lingkungan sekitar yang mendukung dan sumber daya yang cukup juga menentukan sejauhmana peserta dapat menerapkan hasil pembelajaran. Pendidikan dan pelatihan Fasilitator Desa Tangguh hanya mengolah aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dan tidak bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan pendukung dan sumberdaya yang cukup untuk penerapan hasil pembelajaran. Lingkungan pendukung dan sumberdaya yang cukup merupakan tanggung jawab pihak tempat peserta bernaung/bergabung.

## E.2. Tahap Pendidikan dan Pelatihan



Sumber: FASD Regional Training Center (2008)

Pendidikan dan pelatihan fasilitator desa tangguh bencana dimulai dari kajian kebutuhan belajar dari para calon peserta untuk menemukan kebutuhan belajar dan pengalaman calon peserta. Hasilnya kemudian menjadi dasar dalam merancang pelatihan. Di dalam pelaksanaan pelatihan, peserta mempelajari kompetensi baru ataupun mengasah kompetensi yang sudah dimilikinya. Peserta kemudian menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pelatihan. Disarankan, peserta diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan/tugas-tugasnya. Pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pimpinan ataupun penyelenggara pendidikan dan pelatihan, memantau bagaimana praktik peserta. Hasil pemantauan ini merupakan bahan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki rancangan pelatihannya ataupun merancang pelatihan lanjutan.

### **E.3. Metode dan Media Belajar**

Untuk menunjang terselenggaranya proses pelatihan, metode yang digunakan adalah (1) Diskusi forum atau kelompok berdasarkan studi kasus, panduan pertanyaan, pemutaran film, slide foto ataupun potongan gambar, serta permainan; (2) Refleksi pengalaman dan menarik pembelajaran; (3) Pemaparan narasumber dan tanya-jawab; (4) Bermain peran; (5) Simulasi di lokasi. Sedangkan media yang diperlukan adalah (1) Modul diklat yang memuat langkah-langkah belajar, metode yang digunakan, materi dan bahan bacaan, lembar kerja bagi peserta; (2) Perlengkapan dan peralatan pelatihan seperti alat peraga, carta, permainan, film, dan sarana lain (LCD proyektor, kertas plano, spidol, dll); (3) Ruang pelatihan di dalam maupun luar ruangan yang memadai.

### **E.4. Evaluasi**

Evaluasi dibagi dalam tiga sasaran yaitu: peserta, panitia penyelenggara dan tenaga pengajar. Evaluasi bagi peserta berupa: (1) Tes tertulis sebelum dan sesudah pelatihan yang kemudian dibandingkan hasilnya; (2) Observasi keterlibatan peserta dalam proses pelatihan dan hasil kerja peserta berdasarkan tugas yang diberikan selama pelatihan; (3) Tulisan refleksi yang diberikan peserta setelah pelatihan untuk memastikan penerapan materi di lapangan; (4) Disarankan: penilaian/catatan dari masyarakat ataupun pimpinan atas kinerja peserta di lapangan pasca-pelatihan.

Bagi penyelenggara, evaluasi dilakukan saat pelatihan dan setelah pelatihan. Hal yang dievaluasi saat pelatihan adalah fasilitas (akomodasi, ketersediaan materi dan peralatan) dan ketersediaan informasi untuk peserta dan lembaga/pimpinan peserta. Hal yang dievaluasi setelah pelatihan adalah ketersediaan informasi untuk peserta dan lembaga/pimpinan peserta mengenai proses dan hasil pendidikan dan pelatihan, serta perkembangan peserta dan kebutuhan pembelajaran lanjutan. Evaluasi yang diberikan untuk pengajar adalah materi yang diberikan, metode dan proses pembelajaran.



### **BAB III**

## **PERSYARATAN UMUM DAN SILABUS KURIKULUM PELATIHAN FASILITATOR DESA TANGGUH BENCANA**

### **A. Persyaratan Umum**

#### **A.1. Sasaran**

Sasaran peserta rangkaian Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana adalah berbagai pihak yang berkepentingan dan berkomitmen untuk menjalankan program-program ketangguhan masyarakat secara mandiri, meliputi BPBD dan SKPD terkait, LSM, ormas, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan lembaga usaha.

- a. Instansi/Lembaga Pemerintah: peserta berasal dari instansi/lembaga di tingkat daerah yang memiliki tugas memfasilitasi masyarakat secara langsung di tingkat komunitas, desa/kelurahan, dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk membangun ketangguhan terhadap bencana.
- b. Masyarakat : peserta berasal dari organisasi sosial/institusi pendidikan/lembaga swadaya masyarakat/kelompok warga mulai dari tingkat desa yang bersedia memfasilitasi proses pengembangan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di komunitas, desa/kelurahan, dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.  
Dunia Usaha : peserta berasal dari perusahaan/sector swasta/ pelaksana program tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait dengan pengembangan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di tingkat komunitas, desa/kelurahan, dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

#### **A.2. Kriteria Calon Peserta**

Kriteria calon peserta dibedakan berdasarkan tiap jenjang pelatihan, agar peserta terseleksi berdasarkan kompetensi yang didapatkan dari jenjang sebelumnya serta memastikan adanya penerapan materi pelatihan



dan peningkatan kompetensi. Tidak ada perbedaan kriteria untuk peserta dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

#### Tingkat Dasar:

1. Memiliki motivasi untuk bekerja bersama masyarakat dalam membangun ketangguhan
2. Bersedia secara intensif berada di lokasi program dan berkegiatan bersama masyarakat
3. Berasal dari daerah setempat, setidaknya dari provinsi yang sama
4. Mampu membaca dan menulis
5. Berkomitmen menerapkan hasil pelatihan tingkat dasar di tingkat masyarakat dan menuliskan refleksi pengalamannya setidaknya satu tulisan.

#### Tingkat Menengah:

1. Pernah ikut pelatihan basic dan memberikan satu tulisan tentang pengalaman praktik hasil pelatihan basic.
2. Melakukan tindak lanjut pelatihan basic di masyarakat.
3. Memfasilitasi masyarakat secara intensif selama setidaknya empat bulan.
4. Berkomitmen menerapkan hasil pelatihan tingkat menengah di tingkat masyarakat dan menuliskan refleksi pengalamannya setidaknya satu tulisan.

#### Tingkat Lanjut:

1. Pernah ikut pelatihan intermediate dan memberikan satu tulisan tentang pengalaman praktik hasil pelatihan intermediate.
2. Melakukan tindak lanjut pelatihan intermediate di masyarakat.
3. Memfasilitasi masyarakat secara intensif selama setidaknya setahun.
4. Berkomitmen menerapkan hasil pelatihan tingkat akhir di tingkat masyarakat dan menuliskan refleksi pengalamannya setidaknya satu tulisan.

### **A.3. Kriteria Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar dalam proses pendidikan dan pelatihan ini terdiri dari fasilitator dan narasumber.

1. Fasilitator bertugas memperlancar proses pembelajaran peserta dengan mendorong peserta menguraikan pengalaman secara terstruktur, menggali tanggapan peserta, menghubungkan pengalaman peserta dengan sumber informasi yang relevan dan dapat digunakan peserta, mendorong peserta untuk menemukan pola hubungan dan kaitan antar-topik, serta hal-hal baru yang dapat dikembangkan. Ia lalu mengajak peserta merumuskan makna realitas tersebut sebagai suatu pemahaman baru. Berdasarkan tugas tersebut, kriteria fasilitator adalah mereka yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan memadai untuk memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa.
2. Narasumber bertugas memberikan informasi tambahan berdasarkan pengalaman empiris ataupun kajian akademis terkait topik-topik yang relevan dengan tugas para peserta sebagai fasilitator masyarakat. Untuk itu, kriteria narasumber adalah mereka yang mempunyai latar belakang akademis ataupun empiris (praktisi) dalam topik-topik pendidikan dan pelatihan yang sudah teruji atau terbukti dan dapat dipercaya.

### **A.4. Kriteria Penyelenggara**

Lembaga/instansi pemerintah, non-pemerintah maupun dunia usaha yang berkepentingan untuk mengembangkan ketangguhan masyarakat dapat menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana, dengan berkoordinasi kepada Pusdiklat PB BNPB mengenai rencana, pelaksanaan, dan pelaporan pelatihan.



## B. SILABUS

### B.1. Tingkat Dasar (Basic)

Kompetensi:

1. Memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang ketangguhan masyarakat terhadap bencana
2. Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif untuk membangun ketangguhan
3. Memfasilitasi perencanaan kegiatan untuk membangun ketangguhan masyarakat dengan melibatkan banyak pihak
4. Mengkaji dan memberikan masukan sebagai pembelajaran dalam kerangka pengembangan dan keberlanjutan program

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
1	Memahami keterkaitan antara penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hubungan bencana dan perubahan iklim</li> <li>2. Menjelaskan hubungan bencana dan pembangunan</li> <li>3. Menjelaskan PRB merupakan upaya pembangunan berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar sesi</li> <li>2. Slide show foto perubahan iklim dan bencana</li> <li>3. Diskusi kelompok berdasarkan kasus dan presentasi: dampak perubahan iklim pada bencana suatu desa</li> <li>4. Menonton film pembangunan di desa yang kemudian mengakibatkan bencana</li> <li>5. Curah pendapat di forum: Pembangunan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana</li> </ol>	3 JPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bencana</li> <li>- Pembangunan</li> <li>- Perubahan iklim</li> <li>- Pengelolaan risiko bencana</li> <li>- Pembangunan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Film pembangunan di desa</li> <li>- Film PRB</li> <li>- Foto bencana dan perubahan iklim</li> <li>- Paparan presentasi</li> <li>- Cerita kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menonton film</li> <li>- Slide show foto</li> <li>- Diskusi kelompok</li> <li>- Studi kasus</li> <li>- Paparan</li> </ul>	Hasil diskusi kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<p>6. Paparan foto pembangunan yang rusak akibat dari bencana</p> <p>7. Paparan tentang hubungan bencana, pembangunan dan perubahan iklim</p> <p>8. Diskusi kelompok: apa solusi yang ditawarkan untuk konteks studi kasus di desa dengan isu pembangunan, bencana, dan perubahan iklim?</p> <p>9. Film upaya-upaya PRB yang dilakukan masyarakat dan pihak lain</p>					
2	Mampu memahami dasar hukum, kebijakan PB dan yang terkait di tingkat nasional dan daerah	<p>1. Menjelaskan dasar hukum &amp; kebijakan penanggulangan bencana nasional dan daerah</p> <p>2. Memaparkan kaitan antara kebijakan penanggulangan bencana dan kebijakan lain (tata ruang,</p>	<p>1. Pengantar sesi (penjelasan tujuan, metode, pengantar materi)</p> <p>2. Studi kasus dalam kelompok tentang keterkaitan peraturan &amp; kebijakan PB dengan yang lainnya</p> <p>a. Diskusi/analisis kasus dengan beberapa pertanyaan kunci</p> <p>b. Menghubungkan peraturan dan kebijakan PB dengan kebijakan sektor lain</p>	4 JPL	Peraturan & kebijakan - PB - Tata ruang - Lingkungan - Iklim - Pesisir & Kelautan - Perencanaan Pembangunan	Lembar kasus (diutamakan kasus-kasus dari peserta)  pertanyaan kunci  Dokumen regulasi	Studi kasus  Presentasi kelompok  Pemaparan	Observasi proses dan hasil diskusi kelompok  Penilaian terhadap umpan balik peserta

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		<p>pesisir dan kelautan, sistem perencanaan pembangunan)</p>	<p>c. Presentasi hasil analisis kelompok</p> <p>3. Pemaparan materi tentang dasar hukum penanggulangan bencana dan kaitannya dengan kebijakan lain</p>					
3	Menganalisis konsep pengelolaan risiko bencana (PRB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menguraikan relasi antar variabel dalam risiko bencana (bahaya, kerentanan, kapasitas)</li> <li>Menjelaskan pengertian pengelolaan risiko bencana</li> <li>Memberikan contoh upaya-upaya PRB dalam fase penanggulangan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar sesi</li> <li>Mengamati foto/membuat kolase gambar tentang risiko bencana.</li> <li>Curah pendapat / diskusi tentang risiko</li> <li>Pemaparan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis-jenis bahaya</li> <li>Risiko bencana</li> <li>Pengelolaan risiko bencana (PRB)</li> </ol> </li> <li>Diskusi kelompok tentang upaya-upaya pengelolaan risiko dalam siklus penanggulangan bencana</li> <li>Pemaparan tentang upaya-upaya pengelolaan risiko bencana dalam siklus penanggulangan bencana</li> <li>Kesimpulan sesi</li> </ol>	4 JPL	<p>Konsep risiko bencana dan uraian tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahaya</li> <li>- Kerentanan</li> <li>- Kapasitas</li> </ul> <p>Fase PB Upaya-upaya PRB tiap fase</p>	Foto, tumpukan surat kabar	<p>Slide show foto</p> <p>Kolase</p> <p>Curah pendapat</p> <p>Pemaparan</p> <p>Diskusi kelompok</p>	<p>Observasi terhadap diskusi kelompok</p> <p>Hasil diskusi kelompok</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
4	Memahami konsep PRBBK dan pelaksanaannya, serta memiliki pandangan/sikap yang berpusat pada orang (people centred)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pengertian dan karakteristik PRBBK (yang berpusat pada masyarakat)</li> <li>Menguraikan nilai dan prinsip PRBBK, beserta contoh nyata di masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar sesi</li> <li>Peserta mengamati gambar-gambar yang menunjukkan sekelompok orang dan berpendapat tentang gambar mana yang disebut dengan 'komunitas'</li> <li>Pemaparan tentang pengertian dan karakteristik komunitas</li> <li>Diskusi pleno tentang PRBBK: <ol style="list-style-type: none"> <li>Siapa yang paling memahami bahaya di daerahnya?</li> <li>Apa yang paling berisiko dari bahaya di daerahnya?</li> <li>Siapa saja yang berperan dalam mengurangi risiko?</li> </ol> </li> <li>Pemaparan tentang pengertian dan karakteristik PRBBK</li> <li>Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi tentang kesesuaian program-program sudah ada dengan karakteristik PRBBK</li> </ol>	4 JPL	PRBBK: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian &amp; karakteristik komunitas</li> <li>Nilai &amp; prinsip PRBBK</li> <li>Metode &amp; tahapan PRBBK</li> <li>Contoh-contoh nyata PRBBK</li> </ul>	Gambar kumpulan orang/komunitas	Curah pendapat  Diskusi kelompok  Pemaparan	Observasi terhadap proses kelompok (curah gagasan, diskusi, presentasi)  Hasil diskusi kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			7. Curah pendapat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip PRBBK. 8. Pemilahan antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip PRBBK secara pleno. 9. Pemaparan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip PRBBK. 10. Penugasan peserta untuk memberikan contoh nyata tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip PRBBK. 11. Kesimpulan sesi.					
5	Memahami Desa Tangguh Bencana serta pelaksanaannya dalam berbagai program	1. Memahami apa itu Desa Tangguh Bencana 2. Menjelaskan kebijakan (Perka BNPB), tujuan dan strategi desa tangguh 3. Mengklasifikasi indikator ketangguhan	1. Pengantar sesi 2. Diskusi kelompok: a. Apa itu Desa Tangguh Bencana b. Mengidentifikasi berbagai program di masyarakat terkait ketangguhan c. Menyimpulkan hubungan berbagai program tersebut 3. Presentasi hasil kelompok dan penyimpulan	4 JPL	Kebijakan Desa Tangguh (Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012)  Kategori Desa Tangguh dan indikator-indikatornya  Macam-macam program serupa Desa Tangguh (kampung iklim, desa siaga, dsbnya)	Perka no 1 tahun 2012  Lembar kuis  Puzzle indikator desa tangguh  Ringkasan program terkait desa tangguh	Kuis  Permainan  Studi kasus,  Pemaparan	Hasil puzzle  Hasil studi kasus sinergi desa tangguh dengan program lain



No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		tingkat desa/kelurahan berdasarkan kategori tingkatan Desa Tangguh  4. Mengetahui pelaksanaan Desa Tangguh  5. Menjelaskan perbedaan peran antara BNPB, BPBD, fasilitator desa dan pelaku lainnya	4. Peserta membaca Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012  5. Kuis tentang kebijakan, strategi, dan indikator desa tangguh.  6. Pembahasan jawaban peserta.  7. Pemaparan materi tentang desa tangguh.  8. Permainan puzzle untuk mengklasifikasikan indikator-indikator desa tangguh pratama, madya, dan utama.  9. Curah pendapat dan penyimpulan tentang peran BNPB, BPBD, fasilitator desa dan pelaku lainnya.					
6	Memiliki keterampilan dan sikap yang mendukung pembelajaran orang dewasa	1. Menjelaskan prinsip pembelajaran orang dewasa dan peran fasilitator masyarakat  2. Mempraktikkan teknik-teknik fasilitasi	1. Pengantar sesi: prinsip pembelajaran orang dewasa  2. Teknik-teknik fasilitasi: bermain peran memfasilitasi di kelompok dengan menggunakan lembar kasus  3. Refleksi: a. Dari proses bermain peran: yang sudah baik,	4 JPL	Prinsip pembelajaran orang dewasa  Peran fasilitator masyarakat  Teknik fasilitasi	Bahan/alat permainan tematik  Lembar kasus untuk bermain peran	Permainan tematik  Pemaparan  Bermain peran  Diskusi kelompok	Observasi proses belajar peserta (saat bermain, refleksi, diskusi) Hasil diskusi kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		3. Memberikan masukan untuk perbaikan praktik fasilitasi	<p>perlu diperbaiki, hal baru</p> <p>b. Informasi tambahan: teknik-teknik lain yang tidak muncul dalam bermain peran</p> <p>4. Kesimpulan sesi: penegasan prinsip dan teknik pembelajaran orang dewasa</p>					
7	Merancang penggunaan PRA untuk proses pengkajian risiko bencana di masyarakat	<p>1. Menjelaskan tujuan dan prinsip PRA</p> <p>2. Menggunakan 4 alat PRA (sejarah bencana, kalender musim, akar masalah, dan peta desa/ kelurahan) untuk menganalisis risiko bencana</p> <p>3. Menyusun rencana fasilitasi analisis risiko</p>	<p>1. Pengantar sesi</p> <p>2. Paparan pengantar PRA (pengertian, tujuan)</p> <p>3. Pemaparan alat PRA untuk analisis risiko bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akar masalah</li> <li>- Sejarah bencana</li> <li>- Kalender musim</li> <li>- Peta desa</li> </ul> <p>4. Kerja kelompok berdasarkan studi kasus: berlatih analisis dengan akar masalah, sejarah bencana, kalender musim; dilanjutkan gallery walk agar peserta membandingkan hasil kerja mereka</p> <p>5. Pemaparan alat PRA untuk analisis risiko bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta desa</li> </ul>	6 JPL	<p>Analisis risiko bencana (rumus HVC)</p> <p>PRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang, tujuan, prinsip</li> </ul> <p>Alat PRA yang minimal untuk analisis risiko bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akar masalah</li> <li>- Sejarah bencana</li> <li>- Kalender musim</li> <li>- Peta desa</li> </ul>	Lembar kasus tentang kondisi sebuah desa	<p>Pemaparan</p> <p>Kerja kelompok: diskusi dan simulasi</p>	<p>Observasi peserta</p> <p>Hasil kerja kelompok</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<p>6. Kerja kelompok: simulasi membuat peta desa yang dipandu fasilitator masyarakat</p> <p>7. Refleksi dan penyimpulan proses berlatih PRA</p> <p>8. Paparan tentang menyusun rencana fasilitasi</p> <p>9. Kerja kelompok: membuat rencana fasilitasi dan gallery walk untuk membandingkan hasil tiap kelompok.</p>					
8	Membuat perencanaan kegiatan dengan melibatkan banyak pihak untuk membangun ketangguhan masyarakat	<p>1. Mengidentifikasi kemungkinan aktivitas-aktivitas pengelolaan risiko bencana di masyarakat</p> <p>2. Menyajikan data sumber daya di masyarakat dan pelaku PB untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas PRB</p>	<p>1. Pengantar sesi</p> <p>2. Pemaparan tentang menyusun perencanaan partisipatoris:</p> <p>a. Konsep dasar</p> <p>b. Proses</p> <p>c. Perangkat: penyusunan peringkat prioritas, SWOT, matriks Rencana Aksi Komunitas</p> <p>3. Curah pendapat: identifikasi berbagai kemungkinan aktivitas PRB berdasarkan hasil PRA dari sesi sebelumnya.</p>	4 jpl	Perencanaan partisipatoris Kajian kapasitas: stakeholder dan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil-hasil PRA</li> <li>• Contoh berbagai aktivitas PRB di masyarakat</li> <li>• Foto/film/gambar kegiatan PRB masyarakat</li> </ul>	Paparan Diskusi kelompok	Hasil diskusi kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		3. Menyusun rencana aksi komunitas untuk pengelolaan risiko bencana	4. Paparan: kajian kapasitas/ sumberdaya, 5. Diskusi kelompok untuk menyusun RAK a. Memetakan para pelaku dan sumberdaya untuk melakukan aktivitas PRB yang sudah disusun pada tahap sebelumnya b. Menyusun prioritas aksi PRB dengan melihat kapasitas, kerentanan, dan bahaya c. Membuat matriks RAK 6. Presentasi					
9	Merencanakan pengorganisasian relawan PB di desa/kelurahan	1. Menentukan kriteria relawan PB/kader untuk pengorganisasian masyarakat 2. Menentukan langkah-langkah untuk membentuk dan mengorganisir relawan PB	1. Pengantar sesi 2. Pemutaran film terkait relawan PB 3. Diskusi kelompok: siapa relawan, kriteria, identifikasi kelompok di desa yang bisa menjadi relawan 4. Peserta membandingkan hasil diskusi kelompok dengan Perka BNPB No. 17/2011 (Pedoman Relawan PB) dan Permen Kemensos tentang KSB, untuk menyimpulkan:	4 JPL	- Kriteria relawan - Manajemen relawan - Perka No.17/2011 tentang Pedoman Relawan PB - Permen Kemensos tentang KSB	Film singkat terkait relawan PB Profil 4 desa	Pemutaran film Curah pendapat Pemaparan Diskusi kelompok Studi kasus	Hasil diskusi kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip-prinsip pengelolaan relawan</li> <li>b. proses pengorganisasian relawan</li> <li>c. strategi pengorganisasian relawan</li> <li>d. kecakapan yang perlu dimiliki relawan</li> </ul> <p>5. Diskusi kelompok studi kasus 4 desa: bagaimana langkah-langkah dan strategi untuk membentuk dan mengorganisir relawan</p> <p>6. Presentasi hasil (bisa juga world cafe/gallery walk)</p> <p>7. Kesimpulan sesi</p>					

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran (sudut pandang peserta)	Waktu	Lingkup Materi	Sumber & Bahan	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
10	Membuat dokumentasi pembelajaran program	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyimpulkan bentuk dan isi dokumentasi dari 3 perangkat (laporan kegiatan, cerita masyarakat, perangkat evaluasi) untuk dokumentasi pembelajaran</li> <li>Membuat laporan kegiatan untuk dokumentasi program.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar sesi</li> <li>Brainstorming pengalaman peserta dalam mendokumentasikan program</li> <li>Peserta mengamati macam-macam perangkat dokumentasi program beserta contohnya untuk mengetahui bentuk dan isi dokumentasi</li> <li>Praktek membuat laporan kegiatan berdasarkan kasus</li> <li>Diskusi review penggunaan perangkat (laporan kegiatan) program.</li> </ol>	3 JPL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi pelaksanaan program.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh-contoh dokumen.</li> <li>Petunjuk teknis pelaksanaan &amp; evaluasi program</li> <li>Ilustrasi kasus</li> </ul>	Curah pendapat, melihat contoh, paparan, praktek, diskusi	Hasil praktek

## B.2. Tingkat Menengah (Intermediate)

Kompetensi:

1. Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif untuk membangun ketangguhan.
2. Memfasilitasi perencanaan kegiatan dengan melibatkan banyak pihak untuk membangun ketangguhan masyarakat.
3. Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan program ketangguhan masyarakat dengan menggunakan sumberdaya dan kearifan lokal secara akuntabel.
4. Mengkaji dan memberikan masukan sebagai pembelajaran dalam kerangka pengembangan dan keberlanjutan program.

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
1	Mengevaluasi penerapan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam memfasilitasi pengembangan ketangguhan masyarakat secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan kembali pengetahuan dan keterampilan dasar untuk memfasilitasi masyarakat</li> <li>2. Memberi masukan terhadap proses fasilitasi masyarakat yang sudah dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review: kuis berisi materi pelatihan tingkat dasar.</li> <li>2. Paparan dari fasilitator tentang materi yang sudah diberikan ketika pelatihan dasar.</li> <li>3. Kerja kelompok: berbagi pengalaman memfasilitasi masyarakat di kelompok:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal-hal yang berjalan baik</li> <li>- Tantangan dan solusi yang diambil</li> <li>- Capaian (secara program dan secara personal)</li> <li>- Hal yang ingin diketahui lebih lanjut</li> </ul> </li> </ol>	3 JPL	<p>Dokumen pembelajaran fasilitator/ laporan</p> <p>Hasil penilaian kinerja fasilitator</p> <p>Hasil penilaian kebutuhan pengembangan fasilitator</p> <p>Rencana tindak lanjut Pusdiklat</p>	<p>Penilaian kinerja fasilitator</p> <p>Penilaian kebutuhan pengembangan fasilitator</p>	<p>Kuis Berbagi pengalaman</p> <p>Membuat poster</p> <p>Presentasi</p>	Observasi proses kelompok dan hasil kerja kelompok (poster)

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		3. Menemukan tambahan pemahaman/ pembelajaran dari pengalaman memfasilitasi masyarakat	4. Kerja kelompok: membuat poster yang merangkum proses diskusi di atas; lalu presentasi. 5. Paparan analisis dari penilaian kinerja fasilitator dan penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas fasilitator; serta rencana tindak lanjutnya.					
2	Menerapkan perangkat PRA lanjutan untuk Desa Tangguh	1. Memahami berbagai perangkat PRA lanjutan 2. Memilih perangkat PRA yang sesuai dengan kebutuhan pengkajian risiko bencana 3. Mensimulasikan setidaknya 3 perangkat PRA lanjutan 4. Membandingkan kesesuaian penggunaan perangkat	1. Pengantar: - Permainan risiko bencana - Tujuan sesi 2. Pemaparan: - perangkat yang sudah digunakan ketika tingkat dasar - perangkat PRA lanjutan beserta contohnya 3. Diskusi kelompok: kelemahan dan kekuatan masing-masing perangkat 4. Kerja kelompok berdasarkan studi kasus: memilih dan mensimulasikan penggunaan perangkat	6 JPL	1. Perangkat PRA: perangkat kesejahteraan; analisis sumber penghidupan berkelanjutan; pemetaan kelompok dan aset yang rentan, pemetaan lokasi & kapasitas sumber daya (alam, manusia, ekonomi, fisik, tatanan sosial-budaya); matriks risiko; diagram venn, sketsa kebun, aktivitas harian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilustrasi kasus: Profil desa / kelurahan, Profil ancaman bencana</li> <li>• Contoh-contoh perangkat PRA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permainan</li> <li>• Pemaparan</li> <li>• Diskusi kasus</li> <li>• Simulasi</li> </ul>	<p>Observasi proses kelompok</p> <p>Hasil diskusi kelompok.</p>



No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		PRA lanjutan dengan kebutuhan pengkajian risiko	<p>untuk kajian kerentanan dan kapasitas (*setiap kelompok mendapat kasus yang berbeda)</p> <p>5. Presentasi kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan pengkajian</li> <li>- Pilihan alat dan alasannya</li> <li>- Hasil penggunaan alat</li> </ul> <p>6. Review: tiap kelompok saling mengevaluasi kesesuaian penggunaan perangkat PRA dengan kebutuhan pengkajian</p> <p>7. Penyimpulan</p>					
3	Membuat rencana kerja	1. Menggunakan matriks perencanaan kegiatan sesuai dengan Permendagri 66/2007 tentang perencanaan desa, Permendagri 34/2007 tentang	<p>1. Pengantar sesi</p> <p>2. Paparan matriks perencanaan per kegiatan di dalam RAK</p> <p>3. Kerja kelompok: menggunakan matriks perencanaan kegiatan; lalu tiap kelompok saling memeriksa hasil kelompok lain.</p> <p>4. Kerja kelompok:</p>	4 JPL	Matriks perencanaan Contoh-contoh kerangka acuan kegiatan	<p>Contoh hasil RAK</p> <p>Permendagri 66/2007 tentang perencanaan desa Permendagri 34/2007 tentang perencanaan kelurahan</p>	<p>Paparan</p> <p>Studi kasus</p> <p>Praktik menulis dokumen proposal dan kerangka acuan kegiatan</p>	<p>Hasil kerja kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Proposal</li> <li>- Kerangka acuan kegiatan</li> </ul>

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		perencanaan kelurahan 2. Menuliskan hasil perencanaan dalam kerangka acuan kegiatan	Menuangkan gagasan perencanaan tersebut dalam penulisan proposal dan kerangka acuan kegiatan					
4	Memahami komponen-komponen dalam rencana kesiapsiagaan	1. Merancang sistem peringatan dini di masyarakat 2. Menyusun rencana tanggap darurat 3. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan	1. Pengantar sesi 2. Kerja kelompok menyusun sistem peringatan dini a. Menentukan komponen sistem peringatan dini (SPD): risiko, pemantauan, penyebaran informasi, pengurangan risiko, respons b. Mengidentifikasi SPD biasa digunakan masyarakat c. Mengidentifikasi kearifan lokal dalam SPD d. Menyusun SPD yang memanfaatkan kearifan local 3. Kerja kelompok menyusun rencana tanggap darurat berdasarkan pengalaman peserta atau kasus	8 JPL	Sistem Peringatan Dini Rencana Tanggap Darurat (Rencana Kontijensi, SOP Tanggap Darurat)	• Ilustrasi kasus/pengalaman peserta		

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun skenario bencana</li> <li>b. Perkiraan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk tanggap darurat</li> <li>c. Memetakan pihak-pihak yang terlibat, pembagian tugas dan mekanisme kerja</li> <li>d. Menyusun mekanisme memobilisasi sumber daya dan koordinasi ketika tanggap darurat terjadi</li> </ul> <p>4. Curah pendapat tentang peningkatan kapasitas tanggap darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengetahuan dan keterampilan apa yang diperlukan untuk tanggap darurat</li> <li>b. Pihak-pihak yang dapat memberikan peningkatan kapasitas</li> <li>c. Cara mengakses pihak-pihak tersebut</li> </ul>					

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
5	Memahami monitoring dan evaluasi secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pentingnya monitoring-evaluasi partisipatif</li> <li>Memaparkan prinsip dan metode monitoring-evaluasi partisipatif</li> <li>Menyusun mekanisme monitoring-evaluasi partisipatif</li> <li>Membedakan cara melakukan monitoring-evaluasi yang baik dan buruk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar sesi</li> <li>Diskusi kelompok menggunakan ilustrasi kasus dari suatu program yang tidak mencapai sasaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah apa yang muncul dalam kasus?</li> <li>Mengapa masalah tersebut muncul?</li> <li>Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah terjadi? Bagaimana cara melakukannya?</li> </ul> </li> <li>Peserta membandingkan berbagai pendekatan monitoring dan menyimpulkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>prinsip partisipatif</li> <li>jenis monitoring-evaluasi</li> <li>mekanisme umpan balik</li> <li>metode dan alat monitoring –evaluasi partisipatif</li> </ul> </li> <li>Penyimpulan bersama: menyusun mekanisme monitoring-evaluasi partisipatif</li> </ol>	4 JPL	Prinsip partisipatif: proses dan pengembalian hasil ke masyarakat Jenis, alat, metode monitoring-evaluasi partisipatif Mekanisme umpan balik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan bacaan tentang monitoring-evaluasi partisipatif</li> <li>Ilustrasi kasus untuk role-play</li> <li>Contoh-contoh laporan monitoring-evaluasi</li> </ul>	Paparan Role-play Praktik menulis dokumen (laporan monev) Presentasi	Observasi peserta Hasil kerja kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana agar monitoring dan evaluasi memastikan agar program berjalan sesuai sasaran?</li> <li>5. Bermain peran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satu kelompok memberikan contoh buruk dalam melakukan monitoring-evaluasi partisipatif</li> <li>b. Satu kelompok memberikan contoh baik dalam melakukan monitoring-evaluasi partisipatif</li> </ul> </li> <li>6. Penyimpulan</li> </ul>					
6	Memiliki keterampilan dasar mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan secara terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan</li> <li>2. Membuat perencanaan keuangan sederhana untuk pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar tentang perencanaan keuangan</li> <li>2. Kerja kelompok: membuat rencana keuangan berdasarkan rencana kegiatan yang dihasilkan pada sesi perencanaan partisipatif</li> <li>3. Gallery walk: saling memeriksa hasil peserta</li> </ol>	4 JPL	Manajemen keuangan dasar Penyimpangan keuangan/fraud Perencanaan keuangan Pelaporan keuangan Format perencanaan dan pelaporan keuangan	<p>Hasil kelompok sesi sebelumnya: rencana kegiatan</p> <p>Contoh-contoh kasus fraud</p> <p>Studi kasus untuk laporan keuangan</p>	<p>Paparan</p> <p>Praktik dalam kelompok</p>	<p>Observasi peserta</p> <p>Hasil kerja kelompok</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		3. Membuat pelaporan keuangan sederhana yang bisa diverifikasi	4. Paparan tentang penyimpangan keuangan/fraud 5. Membuat laporan keuangan berdasarkan studi kasus 6. Kesimpulan: menarik pembelajaran peserta			Bukti-bukti keuangan berdasarkan studi kasus		
7	Mengembangkan program yang mengakomodir kebutuhan dan keterlibatan kelompok rentan	1. Memberi masukan tentang kebutuhan dan keterlibatan kelompok rentan dalam RAK untuk ketangguhan masyarakat 2. Meninjau ulang RAK dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan	1. Pengantar: kesaksian kelompok rentan atau film/gambar/foto tentang kondisi kelompok rentan yang bisa mengembangkan kapasitasnya 2. Diskusi kelompok dan presentasi - identifikasi kelompok rentan yang ada di wilayah masing-masing - kebutuhan kelompok rentan di wilayah masing-masing 3. Paparan fasilitator: - Kelompok rentan di UU PB dan peraturan negara lainnya (misalnya Permendagri)	3 JPL	Kelompok rentan <i>Agency</i>  Contoh-contoh keterlibatan kelompok rentan, best practices  UU PB dan peraturan terkait lainnya	Film tentang kelompok rentan  Ringkasan bacaan tentang keterlibatan kelompok rentan dan best practices	Film  Diskusi	Hasil kerja peserta

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerentanan: spesifik terhadap konteks</li> <li>- <i>Agency</i></li> </ul> <p>4. Diskusi kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keterlibatan kelompok rentan selama program</li> <li>- revisi rencana program</li> </ul> <p>5. Review hasil diskusi</p>					
8	Mengembangkan program Desa Tangguh yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	<p>1. Mengidentifikasi isu pembangunan yang muncul di wilayah kerja masing-masing</p> <p>2. Menemukan hubungan antara program Desa Tangguh, PRBBK dan isu pembangunan</p> <p>3. Memaparkan</p>	<p>1. Pengantar: ilustrasi kasus pembangunan di sebuah desa</p> <p>2. Diskusi kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikasi isu-isu pembangunan yang muncul di lapangan</li> <li>- mengulas RAK PRB Desa Tangguh dan hubungannya dengan isu pembangunan</li> <li>- pemetaan program-program lain yang berupaya menjawab isu pembangunan dilanjutkan dengan gallery walk/world café/presentasi untuk membandingkan hasil antar-kelompok dan</li> </ul>	5 JPL	<p>Isu-isu pembangunan</p> <p>RAK PRB</p> <p>Program-program dari instansi atau lembaga lain.</p> <p>Matriks perencanaan program</p> <p>Proses perencanaan pembangunan desa &amp; kelurahan</p> <p>Contoh-contoh program yang terintegrasi antara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilustrasi kasus pembangunan</li> <li>• Dokumen RAK PRB</li> <li>• Rencana Program dari lembaga lain</li> <li>• Pemendagri (tentang perencanaan pembangunan desa &amp; kelurahan)</li> </ul>	<p>Ilustrasi kasus</p> <p>Diskusi</p> <p>Contoh pengalaman/kasus</p> <p>Paparan</p>	Hasil kerja peserta

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		<p>proses perencanaan pembangunan di nasional hingga tingkat desa/kelurahan</p> <p>4. Mengintegrasikan program ketangguhan masyarakat dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang setara</p>	<p>meringkas hasil.</p> <p>3. Paparan contoh-contoh program yang sudah terintegrasi (antara Desa Tangguh, PRBBK dan program-program pembangunan lainnya).</p> <p>4. Diskusi kelompok: Menyusun rencana integrasi dari program desa tangguh dengan program yang lain.</p> <p>5. Presentasi hasil kelompok &amp; diskusi</p> <p>6. Paparan proses perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kebijakan perencanaan pembangunan nasional hingga daerah</li> <li>- Proses musrenbang secara bertahap</li> <li>- Tahapan musrenbang di tingkat desa/kelurahan/setara</li> </ul> <p>7. Diskusi kelompok:</p>		Desa Tangguh – PRBBK – perencanaan pembangunan desa/kelurahan.			



No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi proses perencanaan pembangunan di desa dan kelurahannya: seberapa baik proses itu berjalan? Kelebihan dan kekurangan Musrenbang?</li> <li>- Bagaimana memadukan rencana program yang sudah terintegrasi (hasil diskusi kelompok sebelumnya) ke dalam perencanaan pembangunan desa /kelurahan?</li> </ul> <p>8. Presentasi hasil diskusi</p> <p>9. Pemaparan tentang strategi pemaduan Desa Tangguh ke dalam perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, termasuk pendanaannya</p> <p>10. Penyimpulan sesi</p>					

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
9	Menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengembangan program ketangguhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memaparkan siklus pengelolaan program</li> <li>Menjelaskan prinsip akuntabilitas</li> <li>Merancang ulang tiap tahapan di siklus pengelolaan kegiatan PRB di masyarakat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Curah pendapat dan paparan singkat: siklus manajemen proyek (project cycle management)</li> <li>Diskusi kelompok: contoh-contoh kasus pelanggaran akuntabilitas dan dampaknya: dari pengalaman peserta, atau dari potongan berita koran/majalah atau dari film.</li> <li>Refleksi dan paparan: <ul style="list-style-type: none"> <li>prinsip akuntabilitas</li> <li>pentingnya akuntabilitas</li> <li>beberapa standar akuntabilitas</li> <li>standar akuntabilitas di Indonesia</li> </ul> </li> <li>Diskusi kelompok: <ul style="list-style-type: none"> <li>review hasil kerja kelompok sebelumnya (perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi) dengan melihat prinsip akuntabilitas</li> <li>menambah langkah kegiatan di tiap</li> </ul> </li> </ol>	3 JPL	<p>Siklus manajemen proyek</p> <p>Prinsip akuntabilitas Standar akuntabilitas bantuan kemanusiaan di Indonesia (HFI)</p> <p>Contoh-contoh pelanggaran akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus pelanggaran akuntabilitas → dari koran, film, atau pengal-man peserta</li> <li>Poster prinsip akuntabilitas</li> </ul>	<p>Curah pendapat</p> <p>Paparan</p> <p>Diskusi kelompok</p>	<p>Observasi peserta</p> <p>Hasil kerja peserta</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Lingkup Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<p>tahapan program untuk memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas</p> <p>5. Kesimpulan</p>					
10	Membuat rekomendasi berdasarkan pengalaman lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi asi hasil belajar dari pengalaman</li> <li>Menyusun rekomendasi berdasarkan pengalaman</li> <li>Menuliskan poin pembelajaran dan rekomendasi dalam beberapa bentuk dokumen (laporan evaluasi dan cerita masyarakat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar</li> <li>Diskusi kelompok: berdasarkan ilustrasi kasus, <ul style="list-style-type: none"> <li>Menarik hasil belajar</li> <li>Membuat rekomendasi</li> </ul> Dilanjutkan review dan komentar melalui marketplace </li> <li>Tugas individual: berdasarkan hasil diskusi kelompok, <ul style="list-style-type: none"> <li>Menuliskan dalam bentuk laporan</li> <li>Menuliskan dalam bentuk success story (human interest story)</li> </ul> </li> </ol>	3 JPL	Pengalaman-pengalaman implementasi program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilustrasi kasus</li> <li>Contoh-contoh laporan</li> <li>Contoh-contoh human interest stories</li> </ul>	<p>Diskusi</p> <p>Praktik individual</p>	Hasil peserta

### B.3. Tingkat Lanjut (*Advance*)

Kompetensi:

1. Memfasilitasi pengembangan jaringan dan berbagi sumberdaya dengan pihak-pihak yang bisa memperkuat upaya ketangguhan masyarakat.
2. Memfasilitasi strategi advokasi masyarakat untuk mencapai ketangguhan.
3. Memfasilitasi pelembagaan upaya ketangguhan dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial di masyarakat.

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
1	Mengevaluasi penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun ketangguhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam membangun ketangguhan masyarakat berdasarkan pengalaman</li> <li>2. Menentukan kebutuhan belajar yang baru untuk membantun ketangguhan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar sesi: tujuan sesi dan ulasan tahap yang sudah dilalui peserta (basic-intermediate)</li> <li>2. Berbagi pengalaman membangun ketangguhan masyarakat: dilakukan oleh beberapa peserta yang mewakili wilayah kerja.</li> <li>3. Berdasarkan pengalaman tersebut, peserta diskusi berkelompok untuk identifikasi keberhasilan, hambatan dalam membangun ketangguhan masyarakat</li> <li>4. Penyimpulan:</li> </ol>	2 JPL	<p>Bagan proses belajar peserta dari basic-intermediate-advance</p> <p>Lembar kasus: pengalaman peserta</p> <p>Laporan program</p>	<p>Foto/film pengalaman lapangan (dari peserta)</p> <p>Dokumen cerita-cerita lapangan</p>	<p>Berbagi cerita</p> <p>Diskusi kelompok</p>	Hasil diskusi kelompok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keberhasilan</li> <li>b. Hambatan terkait kompetensi di tingkat basic-intermediate</li> <li>c. Hambatan lain/baru: misalnya terkait advokasi, jaringan</li> </ul>					
2	Menyusun strategi pengembangan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji kebutuhan sumber daya untuk pengembangan jaringan</li> <li>2. Mengkaji (identifikasi, analisis, evaluasi) para pemangku kepentingan an desa/kelurahan untuk penguatan jaringan</li> <li>3. Menyusun strategi mobilisasi sumberda ya para pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar sesi</li> <li>2. Curah pendapat: berdasarkan diskusi sesi sebelumnya, apa saja kebutuhan sumberdaya yang muncul?</li> <li>3. Mengelompokkan kebutuhan sumberdaya berdasarkan pentagon aset</li> <li>4. Permainan tentang analisis pelaku: diagram venn/jauh-dekat/grafik pengaruh-kepentingan</li> <li>5. Diskusi kelompok dan presentasi, berdasarkan studi kasus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengidentifikasi para pihak</li> <li>- Bagaimana pengaruh-kepentingan? Cara menjalin</li> </ul> </li> </ul>	6 JPL	<p>Pentagon aset</p> <p>Analisis stakeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagram venn</li> <li>- Kawan-lawan</li> <li>- Grafik pengaruh-kepentingan</li> </ul> <p>Matriks strategi pengembangan jaringan</p>	Studi kasus (kasus nyata, kompleks)	Curah pendapat Permainan Diskusi kelompok Presentasi	Hasil kelompok: strategi pengembangan jaringan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<p>hubungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana sumberdaya yang dimiliki &amp; ketersediaan?</li> <li>- Bagaimana akses dan kontrol terhadap sumberdaya? Cara mengakses?</li> <li>- Menyusun mekanisme mobilisasi sumber daya</li> </ul> <p>6. Menyimpulkan: keanekaragaman strategi berjejaring dan mobilisasi</p>					
3	Mensintesis kebijakan untuk membangun ketangguhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian kebijakan yang ada di pemerintahan dan masyarakat</li> <li>2. Menguraikan proses pengembangan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan</li> <li>3. Membandingkan konteks kebutuhan dan permasalahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar sesi: tujuan sesi (sesi hanya memper dalam tentang kebijakan di level pemerintahan, sedangkan untuk masyarakat di sesi selanjutnya)</li> <li>2. Mempelajari dari paparan narasumber: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan publik sebagai suatu sistem, di pemerintahan dan masyarakat, serta unsur-unsur pokoknya</li> <li>b. Proses-proses pembentukan kebijakan di level pemerintah daerah dan pusat</li> </ol> </li> <li>3. Diskusi kelompok:</li> </ol>	8 JPL	<p>Kebijakan publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai sistem</li> <li>- Unsur pokok</li> <li>- Jenis</li> <li>- Proses pembentukan dari daerah hingga pusat</li> <li>- Berbagai kebijakan terkait ketangguhan masyarakat</li> </ul> <p>Advokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerangka kerja advokasi</li> </ul>	<p>Slide: kebijakan publik sebagai suatu sistem dan unsur-unsur pokoknya</p> <p>Handout: "Berbagai Jenis Kebijakan Publik"</p> <p>Handout: "Kerangka Kerja Advokasi Kebijakan Strategi"</p>	<p>Paparan nara sumber</p> <p>Diskusi, tanya jawab</p> <p>Simulasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil peserta</li> <li>- Observasi Fasilitator</li> </ul>

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		<p>di desa atau kelurahan yang terkait ketangguhan masyarakat dan berbagai kebijakan yang relevan</p> <p>4. Memaparkan dampak pelaksanaan dari kebijakan</p> <p>5. Merumuskan strategi advokasi kebijakan</p>	<p>a. Berdasarkan pengalaman, bagaimana proses pembentukan kebijakan mulai dari level desa?</p> <p>b. Apa yang sudah baik dari proses tersebut? Yang perlu diperbaiki dan bagaimana?</p> <p>c. Kebijakan-kebijakan apa yang berlaku di desa, yang terkait dengan ketangguhan masyarakat? Bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya?</p> <p>4. Mempelajari dari paparan narasumber:</p> <p>a. Pengalaman melakukan advokasi yang gagal</p> <p>b. Pengalaman melakukan advokasi yang sukses</p> <p>c. Advokasi Kebijakan Strategis dengan menggarisbawahi pada (1) syarat-syarat advokasi, (2) perlunya merencanakan dampak dari advokasi</p> <p><i>(paparan narasumber diselingi dengan durah pendapat/diskusi forum, misalnya consensus</i></p>			<p>Slide: Advokasi Kebijakan Strategis</p> <p>Ilustrasi kasus nyata untuk advokasi Dokumen-dokumen praktik baik advokasi</p>		

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
			<p><i>tentang advokasi yang gagal dan sukses)</i></p> <p>5. Diskusi kelompok berdasarkan studi kasus: merumuskan strategi advokasi kebijakan termasuk kemitraan yang perlu dibangun</p> <p>6. Simulasi advokasi berdasarkan hasil diskusi</p> <p>7. Menyimpulkan pembelajaran sesi</p>					
4	Mensintesis sistem sosial di masyarakat yang mendukung ketangguhan	<p>1. Mengidentifikasi keberadaan sistem sosial yang berfungsi di masyarakat</p> <p>2. Memaparkan dampak dari berfungsinya sistem sosial pada ketangguhan masyarakat</p> <p>3. Menyimpulkan kekuatan-kelemahan tiap sistem sosial</p>	<p>1. Pengantar sesi</p> <p>2. Mempelajari dari paparan narasumber:</p> <p>a. Sistem sosial yang berlaku di masyarakat</p> <p>b. Praktik baik dan buruk dari upaya pelebagaan untuk membangun ketangguhan <i>(diselingi dengan curah pendapat/diskusi forum, misalnya tentang bagaimana merencanakan sistem sosial untuk ketangguhan)</i></p> <p>3. Diskusi kelompok secara bertahap:</p>	8 JPL	<p>Sistem sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur, sistem, struktur</li> <li>- Rekayasa sistem sosial</li> </ul> <p>Mekanisme pembelajaran di masyarakat</p>	<p>Handout sistem sosial</p> <p>Dokumen praktik-praktik baik rekayasa sistem sosial</p> <p>Handout mekanisme pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paparan nara sumber</li> <li>▪ Tanya-jawab</li> <li>▪ Curah pendapat</li> <li>▪ Diskusi</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil/ Pelaporan Tugas Kelompok</li> <li>- Observasi Fasilitator</li> </ul>



No	Kompetensi Dasar	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu	Materi	Sumber, Bahan dan Alat	Metode Penyampaian	Perangkat Penilaian
		<p>4. Menyusun rencana tindakan untuk memperkuat sistem sosial yang mendukung ketangguhan masyarakat</p> <p>5. Menyusun mekanisme pembelajaran di dalam sistem sosial yang mendukung ketangguhan</p>	<p>a. Apa saja sistem sosial dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, dan seperti apa mereka bekerja/berfungsi di masyarakat?</p> <p>b. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Mana yang sudah berjalan baik dan mendukung ketangguhan, mana yang perlu diperkuat?</p> <p>c. Apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsi sistem sosial dan lembaga-lembaga tersebut untuk ketangguhan?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme pembelajaran yang dapat memastikan semua itu berjalan?</p> <p>4. Presentasi: sintesis hasil diskusi</p> <p>5. Kesimpulan</p>					

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pemberdayaan potensi masyarakat menjadi kunci bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efisien, efektif, dan terkoordinasi, seperti tertera dalam Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan Undang-Undang ini diperkuat dengan adanya Perka BNPB no. 1 tahun 2012 mengenai Desa Tangguh. Dalam Desa Tangguh, ketangguhan masyarakat terhadap bencana diperkuat dengan memaksimalkan sumberdaya yang telah ada dalam kehidupan sekelompok masyarakat dan menggunakan sumberdaya dari luar kehidupan masyarakat secara minimal. Berbagai program juga dikembangkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana, yang semuanya berujung pada upaya mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana merupakan upaya Pusdiklat PB BNPB untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten bagi perwujudan desa tangguh, terlepas dari kekhususan tiap program. Diharapkan, kurikulum ini dapat dimanfaatkan berbagai pihak melalui koordinasi dengan Pusdiklat PB BNPB.

Pusdiklat PB BNPB memerlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak agar kurikulum ini digunakan secara akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna. Besar harapan, pihak-pihak yang berkepentingan memantau penggunaan kurikulum ini serta memberi masukan konstruktif. Masukan konstruktif dan refleksi pembelajaran dari berbagai pihak, khususnya para peserta pelatihan, sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan kurikulum ini di masa mendatang.